



REVIU RENCANA KINERJA TAHUN 2017

PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN KELAS IB



KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami panjatkan puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB Tahun 2017.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta pelaksanaan dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana setiap kementerian lembaga dan satuan kerja mandiri wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok fungsi serta pengelolaan sumber dayanya dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dibuat berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang telah ditetapkan.

Penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB tahun 2017 ini bertujuan sebagai pedoman atau dasar dalam mengukur pencapaian kinerja tahunan tahun 2017 yaitu sebagai tolok ukur kinerja untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB Tahun 2017 kepada masyarakat.

Dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB ini berpedoman pada Blue Print atau Cetak Biru Mahkamah Agung tahun 2010-2035, Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB 2015-2019, pencapaian kinerja tahun 2017, serta Rencana Kinerja dan Anggaran Kementerian Lembaga Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB Tahun 2017.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan pemikiran dalam penetapan rencana kinerja tahunan Pengadilan

Negeri Pekalongan Kelas IB ini, semoga kita semua dapat bekerjasama dalam melaksanakan untuk mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan di tahun 2017 ini dengan baik.

Pekalongan, Januari 2018

KETUA PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN
KELAS IB



SARWONO, S.H., M.Hum.
NIP : 195810251982011002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB merupakan salah satu unit organisasi peradilan di bawah Mahkamah Agung RI yang berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman khususnya pelayanan dan penegakan hukum di wilayah hukum Kota Pekalongan yang terdiri dari 4 Kecamatan, 46 desa/kelurahan dan wilayah hukum Kabupaten Pekalongan yang terdiri dari 19 Kecamatan, 282 desa/kelurahan.

Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB tidak dapat terlepas dari birokrasi dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada di Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance).

Sebagai pelaksana Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB Mempunyai visi yaitu : ” *Terwujudnya Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB yang Agung*”.

Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB sebagai pelaksana Pelayan Publik dalam hal Pelayanan dan Penegakan Hukum berkewajiban mempertanggungjawabkan kinerja kepada publik.

Agar pelaksanaan pelayanan publik dapat terukur dengan baik, Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB telah menetapkan Rencana Kinerja Tahunan yang akan dijadikan sebagai acuan dalam menilai kinerjanya dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam 1 (satu) tahun.

Selain itu, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan alat manajemen yang dibutuhkan oleh Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB untuk dapat mengevaluasi capaian kerjanya sehingga bila dalam perjalanannya kinerja Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB menurun, Pimpinan dapat segera melakukan langkah-langkah antisipatif untuk memperbaiki kerjanya.

Oleh karena itu Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB telah menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2017 ini sebagai tolok ukur pencapaian kerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sabagai Pengadilan Negeri Tingkat Pertama.

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dibuatnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB tahun 2017 ini adalah sebagai dasar atau pedoman dalam mengukur pencapaian kinerja tahunan tahun 2017 yakni sebagai tolok ukur kinerja untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB pada Tahun 2017 kepada masyarakat.

BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB 2015-2019 yang setiap tahunnya dilakukan reviu merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang telah ditetapkan dan dijadikan sebagai pedoman untuk membuat perencanaan jangka pendek yang dibuat setiap tahun anggaran.

Untuk merealisasikan tahapan perencanaan lima tahunan tersebut, Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan pada setiap tahun anggaran sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB Tahun 2017 ini telah diupayakan seiring dan sejalan pasca diberlakukannya Reformasi Birokrasi jilid II Mahkamah Agung RI yang Berpedoman pada cetak biru (blue print) tahun 2010-2035. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB Tahun 2017 ini sebagai tonggak awal Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB dalam membangun sebuah sistem pelayanan berbasis jaminan kepastian bagi masyarakat dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Alur Kinerja yang telah dibangun, hal ini dioptimalkan dan sebagai upaya perbaikan secara kontinyu sesuai dengan dinamika perubahan yang terjadi.

Adapun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB adalah sebagaimana yang tergambar dalam matriks sebagai berikut :

REVIU RENCANA KINERJA TAHUNAN

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN KELAS IB

TAHUN ANGGARAN: 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET	INDIKATOR KEGIATAN	ANGGARAN /Rp
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100% 100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	100% 100%	Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	45.760.000
		b. Persentase Perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	90% 90%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	90% 90%	Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	
		c. Persentase Penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	10% 10%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	10% 10%	Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	95% 97% 99%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	95% 97% 99%	Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	
		e. Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan dengan Diversi	2%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	2%	Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80	-	-	80	-	
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	100%	Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	2%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	2%	Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	80%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	80%	Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	tidak ada perkara tipikor	-	-	tidak ada perkara tipikor	-	
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	Program Peningkatan Manajemen	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	100%	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui	1.580.000

	Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan			Peradilan Umum			pembebasan biaya perkara	
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	-	-	100%	-	-
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	100%	Pos Bantuan Hukum	24.000.000
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	1%	-	-	1%	-	-